



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SANUSI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO HUMAS DAN HUKUM**
3. NHK : **675478**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 390.507.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 63.622.000
2. Tanah Seluas 72 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 2.145.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 324.740.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 725.500.000

1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA/RUSH 1.5S AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/B3WAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA/FORTUNER 2.4VRZ 4X2AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 404.000.000
4. MOBIL, YAMAHA YAMAHA/BG6 AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA/R5F04R24L0 MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
6. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/1PA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 8.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 84.950.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.208.957.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.208.957.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SRI WAHYUNI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **792626**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.465.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **1.114.600.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 444.600.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **3.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.035.345.208**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **5.617.945.208**

**III. HUTANG** Rp. **636.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **4.981.945.208**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TRİYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **672934**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 4.265.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 1960 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 440.000.000
3. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 385.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
7. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
8. Tanah Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
9. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
10. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
11. Tanah Seluas 2180 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000



<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>78.000.000</b>
1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
70.000.000		
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 28D Tahun 2009, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.497.812.697</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.869.812.697</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>110.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.759.812.697</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YAYAT SUYATNA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
3. NHK : 680287

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>600.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>90.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>5.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	<b>695.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>40.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>655.000.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.